

BAB V

KESIMPULAN

Pada tanggal 26 Desember 2004 di Samudera Hindia telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo sebesar 9,1 Skala Richter tepatnya berlokasi di barat daya pantai Sumatera. Gempa bumi ini yang kemudian mengakibatkan munculnya gelombang tsunami yang kemudian meluluh lantakkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pulau Nias, kawasan Khao Lak di Thailand dan sebagian besar Sri Lanka.

Tsunami mengakibatkan kehidupan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam keadaan yang hancur total. Parahnya situasi dan kondisi yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Desember tahun 2004 menetapkan status bencana tsunami Aceh sebagai bencana nasional. Banyaknya pejabat struktural di pemerintahan daerah yang ikut menjadi korban dalam bencana tersebut membuat pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dikatakan lumpuh, maka kemudian pemerintah pusat mengambil koordinasi dan penanganan bencana tsunami tersebut dijalankan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya telah diterbitkan juga Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provisinis NAD dan Nias, Sumatera Utara.

Bencana tsunami di Aceh tahun 2004 mendapat perhatian dari seluruh dunia Internasional, puluhan negara secara sukarela menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasi situasi darurat tersebut. 10 negara terbesar yang menyumbangkan bantuan untuk membantu Pemerintah Indonesia adalah Amerika Serikat (US\$ 489,15 Juta), Australia (US\$ 416 Juta), Austria (US\$ 10 Juta),

Cina (US\$ 24,75 juta), Denmark (US\$ 18 juta), Jepang (US\$ 147,79 juta), Jerman (US\$ 7,86 juta), Kanada (US\$ 63,90 juta), Kuwait (US\$ 170 juta), Korea Selatan (US\$ 13,70 juta) dan Norwegia (US\$ 2,19 juta).

Pemerintah Indonesia yang saat itu dalam posisi genting mengalami dilema dalam memutuskan bantuan militer luar negeri tersebut. Yang pertama adalah sebelum bencana tsunami tersebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Daerah Operasi Militer sebagai akibat dari konflik Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis yang menginginkan Aceh merdeka dari Indonesia yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Konflik di Aceh sudah berlangsung selama hampir 30 tahun sejak tahun 1976. Sampai pada tahun 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai status darurat militer mulai dari Mei 2003 sampai Mei 2004 baru setelah itu ditetapkan sebagai daerah status daerah sipil. Selama itu antara TNI dan GAM terus melakukan serangan antara satu sama lain. Dengan masuknya militer asing ke dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam banyak pihak dan kalangan dari dalam negeri yang mengkhawatirkan bahwa militer asing itu disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian membantu GAM untuk meraih tujuannya berpisah dari Indonesia. Kendala yang kedua adalah tentang kedaulatan Negara Indonesia, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan diakui haknya tidak bisa dimasuki dan diintervensi oleh militer atau pihak asing terhadap permasalahan dalam negerinya.

Dampak kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menerima bantuan militer asing dari negara-negara luar guna membantu masyarakat Aceh dalam skripsi saya dapat dibuktikan dengan dua Teori yaitu aktor individual dan *Humanitarian Intervention* (bantuan kemanusiaan). Dalam teori peran, perilaku Individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Disamping itu, teori peranan juga menegaskan bahwa "*Perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik*". Teori ini berasumsi bahwa

perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap bahwa politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Dalam studi kasus kebijakan intervensi militer yang di perbolehkan ke Indonesia kita memakai teori role individu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor utamanya. Pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden Republik Indonesia, dengan latar belakang militernya kebijakan Indonesia pada bencana Aceh berdasarkan ajaran dari militer yang diterimanya yaitu "*Quick to see, quick to decide, quick to act.*" (Gunawan, 2014) yang kemudian membentuk 3 prioritas dalam menghadapi bencana tsunami di Aceh dengan 3 prioritas tersebut yaitu Prioritas pertama adalah Operasi Tanggap Darurat, secara internasional sering disebut Disaster Relief Operations.

Berdasarkan Teori Bantuan Kemanusiaan, Intervensi kemanusiaan adalah intervensi menggunakan kekuatan militer yang diberikan kepada para korban bencana dengan tujuan untuk kemanusiaan. Intervensi militer kemanusiaan bisa berupa bantuan logistik pangan pokok dan air bersih, bantuan tenda evakuasi dan tempat tinggal sementara, ketersediaan pakaian, bantuan pelayanan kesehatan berupa obat-obatan dan tenaga medis, bantuan rehabilitasi pasca bencana dalam bentuk *trauma healing*, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan sarana transportasi. Intervensi kemanusiaan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat asing, negara-negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Dalam standar militer dan pelaksanaanya, ada operasi militer yang disebut sebagai operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang dapat mencakupi sebagai operasi dalam penanganan dan rekonstruksi pasca bencana alam. Dengan menggunakan teori *Humanitarian Intervention* (Bantuan Kemanusiaan) maka militer-militer asing dapat segera memasuki negara tersebut guna membantu masyarakat yang terkena bencana alam tersebut.

Dengan menggunakan teori diatas maka kebijakan pemerintah Indonesia untuk menerima bantuan militer asing dari negara-negara luar sudah tepat. Dengan masuknya militer-militer asing dari negara luar, maka langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk segera memulihkan keadaan di Aceh sangat terbantu sebab banyak pasukan militer dari negara luar yang memiliki peralatan canggih yang dapat membantu tugas TNI/Polri atau BASARNAS menjangkau daerah-daerah yang sulit. Adanya tragedi tsunami ini juga membuktikan bahwa kesetiakawanan antara negara Indonesia dengan negara-negara lainnya telah terjalin dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari pertentangan politik yang terjadi di dalam negeri akibat masuknya militer asing ke tanah Aceh, seluruh negara-negara yang membantu telah sukarela mengerahkan tenaga mereka tanpa bermaksud apapun selain dari membantu meringankan penderitaan masyarakat Aceh ketika bencana tsunami tahun 2004.

